

Deklarasi PMN - Rincian

Deklarasi PMN

Merupakan satu-satunya instrumen ILO yang berisi rekomendasi bagi perusahaan selain bagi pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja. Deklarasi ini dilihat sebagai instrumen pemandu utama mengenai dimensi ketenagakerjaan dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Mendorong kontribusi positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Deklarasi ini juga bertujuan untuk meminimalkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul dari operasional mereka.

Mencerminkan praktik yang baik yang harus diadopsi oleh semua perusahaan (multinasional dan nasional).

Kebijakan umum

Deklarasi berisi seperangkat kebijakan umum yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Kebijakan ini mengundang perusahaan multinasional, pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja untuk

- ➔ menghormati hukum dan peraturan nasional
- ➔ mempertimbangkan praktik-praktik lokal
- ➔ menghormati standar internasional mengenai hak asasi manusia dan hak kerja dan
- ➔ menghormati komitmen sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban internasional yang berlaku.

Perusahaan multinasional dihindai untuk

- ➔ berkonsultasi dengan pemerintah dan, bila sesuai, organisasi pengusaha dan pekerja nasional, untuk membantu kegiatan operasional mereka sesuai dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan, dan tujuan sosial serta struktur negara di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Pemerintah diundang untuk

- ➔ mengesahkan dan mematuhi Konvensi ketenagakerjaan mendasar dan, dalam setiap kegiatan, memberlakukan seluas mungkin prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Rekomendasi khusus untuk pemerintah negara asal perusahaan multinasional termasuk memajukan praktik sosial yang baik dan bersedia melakukan konsultasi dengan pemerintah negara-negara tuan rumah jika diperlukan.

Prinsip-prinsip utama diuraikan dalam 4 bidang utama:

1 Ketenagakerjaan

Bertujuan memastikan upaya mempromosikan kesempatan kerja langsung maupun tidak, kesamaan peluang dan perlakuan, dan jaminan kerja.

Promosi ketenagakerjaan

Perusahaan multinasional harus

- ➔ Mempertimbangkan kebijakan ketenagakerjaan dengan melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, dan organisasi pengusaha dan pekerja sebelum dan selama berjalannya operasi perusahaan
- ➔ Memberikan prioritas terhadap kesempatan kerja, pengembangan kerja, promosi dan kemajuan nasional negara tuan rumah di semua tingkatan
- ➔ Mempertimbangkan pentingnya penggunaan teknologi yang menghasilkan kesempatan kerja secara langsung maupun tidak
- ➔ Mengejar, kapan pun mungkin dilaksanakan, penyelesaian kontrak dengan perusahaan nasional untuk pembuatan suku cadang dan peralatan, serta penggunaan bahan baku lokal.

Pemerintah dihindai untuk

- ➔ Mendorong kebijakan-kebijakan aktif untuk mempromosikan kesempatan kerja yang memastikan tersedianya pekerjaan bagi semua pekerja dan pencari kerja. Pekerjaan tersebut harus seproduktif mungkin.

Kesetaraan peluang dan perlakuan

Perusahaan harus

- ➔ Menjamin prinsip umum kesetaraan kesempatan dan perlakuan berlaku di semua kegiatan perusahaan
- ➔ Menjadikan kualifikasi, keterampilan dan pengalaman sebagai dasar untuk penerimaan, penempatan, pelatihan dan pengembangan staf mereka di semua tingkatan.

Pemerintah harus

- ➔ Mendorong kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dengan tujuan menghapuskan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, keturunan atau asal sosial.
- ➔ Menghindari mensyaratkan perusahaan untuk melakukan diskriminasi berdasarkan salah satu alasan yang disebutkan di atas dan memberikan, bila sesuai, panduan berkelanjutan untuk menghindari diskriminasi dalam pekerjaan.

Keamanan kerja

Perusahaan multinasional dan nasional harus berupaya menyediakan kesempatan kerja yang stabil bagi karyawan mereka melalui

- ➔ Perencanaan tenaga kerja aktif
- ➔ Peninjauan kewajiban yang dinegosiasikan secara bebas mengenai stabilitas pekerjaan dan jaminan sosial dan
- ➔ Menghindari prosedur PHK yang sewenang-wenang.

Perusahaan multinasional selanjutnya didorong untuk

- ➔ Memberikan pemberitahuan yang wajar mengenai perubahan dalam kegiatan operasional mereka, yang akan berdampak besar pada kesempatan kerja dan
- ➔ Mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi dampak dari perubahan tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi pekerja.

Pemerintah harus

- ➔ Mempelajari dampak perusahaan multinasional di berbagai sektor operasi terhadap kesempatan kerja
- ➔ Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menangani dampak pekerjaan dan pasar tenaga kerja dari operasi perusahaan multinasional dan
- ➔ Menyediakan, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional, suatu bentuk perlindungan pendapatan pada saat pemutusan hubungan kerja.

2 Pelatihan

Deklarasi mengidentifikasi cara untuk memaksimalkan pelatihan keterampilan dalam rangka meningkatkan kelayakan kerja.

Perusahaan multinasional diundang untuk

- ➔ Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi pengusaha dan pekerja dalam menyediakan pelatihan yang sesuai bagi karyawan mereka di negara tuan rumah, di semua tingkatan, yang memenuhi kebutuhan perusahaan serta kebijakan pembangunan negara

- ➔ Berpartisipasi bersama perusahaan nasional, dalam program lokal untuk mendorong pembentukan keterampilan dan pengembangan serta bimbingan kejuruan dan
- ➔ Berkontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia lokal dengan menyediakan orang yang berketerampilan untuk membantu pelaksanaan pelatihan dan memberikan kesempatan untuk memperluas pengalaman manajemen lokal dalam operasi mereka di seluruh dunia.

Pemerintah dihimbau untuk

- ➔ Mengembangkan, bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan, kebijakan nasional untuk pelatihan dan panduan kejuruan, yang menyediakan kerangka kerja bagi kebijakan pelatihan perusahaan multinasional.

3 Kondisi kerja dan hidup

Deklarasi ini mencakup rekomendasi mengenai upah dan tunjangan, usia minimum, dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Upah, tunjangan dan kondisi kerja

Perusahaan multinasional

- ➔ Didorong untuk menawarkan pekerja mereka upah, tunjangan dan kondisi kerja yang sebanding dan kurang lebih sama dengan yang ditawarkan para pengusaha setempat dengan kesamaan ukuran dan sumber daya
- ➔ Memberikan upah, tunjangan dan kondisi kerja sebaik mungkin, setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarga mereka apabila perusahaan lain yang sebanding tidak ada.

Pemerintah dihimbau untuk

- ➔ Menerapkan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kelompok berpenghasilan rendah dan daerah yang kurang berkembang memperoleh manfaat sebanyak mungkin dari kegiatan perusahaan multinasional.

Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Untuk menjamin penghapusan pekerja anak secara efektif, perusahaan multinasional dan nasional dihimbau untuk menghormati usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan mengambil tindakan segera dan efektif, sesuai kompetensi mereka sendiri, untuk mengamankan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagai hal yang mendesak.

Keselamatan dan kesehatan kerja

Perusahaan multinasional dihimbau untuk

- ➔ Menjaga standar tertinggi keselamatan dan kesehatan, sejalan dengan pengalaman-pengalaman operasional mereka di negara-negara lain
- ➔ Memasukkan, bila sesuai, hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan dalam perjanjian dengan perwakilan dan organisasi pekerja dan
- ➔ Karena ini merupakan salah satu bidang di mana perusahaan multinasional dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan praktik-praktik setempat, Deklarasi PMN selanjutnya mengundang mereka untuk:

- ♦ Menyediakan informasi yang dapat diakses publik mengenai standar keselamatan dan kesehatan berkaitan dengan operasi lokal mereka, yang mereka amati di negara lain

- ♦ Memberitahu pemerintah daerah, perusahaan dan pekerja akan bahaya khusus dan upaya perlindungan yang terkait dengan produk dan proses baru
- ♦ Bekerja sama dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional tentang masalah keselamatan dan kesehatan
- ♦ Bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas keselamatan dan kesehatan yang berwenang, perwakilan dari pekerja dan organisasi mereka, serta organisasi keselamatan dan kesehatan yang ada, sesuai dengan praktik nasional

Pemerintah dihimbau untuk

- ➔ Menerapkan standar ketenagakerjaan internasional untuk memastikan bahwa baik perusahaan multinasional dan nasional memberikan standar keselamatan dan kesehatan yang memadai bagi pekerja mereka.

4. Hubungan industrial

Deklarasi PMN mendorong perusahaan multinasional untuk memenuhi standar yang tidak lebih rendah dari yang dipatuhi perusahaan lokal dan mengembangkan mekanisme internal untuk konsultasi dan penyelesaian sengketa.

Kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi

Pemerintah, perusahaan multinasional dan nasional dihimbau untuk

- ➔ Mengakui hak-hak pekerja untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi sesuai pilihan mereka tanpa otorisasi sebelumnya

- ➔ Melindungi pekerja terhadap tindakan diskriminasi anti serikat pekerja dan
- ➔ Mengizinkan perwakilan pekerja untuk berkonsultasi di antara mereka sendiri, asalkan tidak merugikan jalannya operasional perusahaan.

Perusahaan multinasional dihimbau untuk

- ➔ Mendukung perwakilan dari organisasi pengusaha.

Pemerintah diundang untuk

- ➔ Mengizinkan perusahaan multinasional dan pekerja mereka bergabung dengan organisasi pengusaha dan pekerja internasional sesuai pilihan mereka
- ➔ Mengizinkan masuknya perwakilan pengusaha dan organisasi pekerja dari negara lain atas undangan organisasi lokal atau nasional yang bersangkutan dalam rangka konsultasi tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama
- ➔ Memastikan bahwa insentif khusus untuk menarik investasi asing tidak mencakup pembatasan kebebasan pekerja untuk berserikat atau hak untuk berorganisasi dan berunding bersama.

Perundingan bersama

Untuk memastikan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, Deklarasi PMN merekomendasikan bahwa

- ➔ Pekerja memiliki organisasi perwakilan sesuai pilihan mereka, yang diakui untuk tujuan perundingan bersama
- ➔ Negosiasi sukarela antara pengusaha atau organisasi pengusaha dan serikat pekerja didukung dan



Perjanjian kerja bersama mencakup ketentuan untuk penyelesaian perselisihan yang timbul atas interpretasi dan penerapan mereka.

Perusahaan multinasional selanjutnya didorong untuk



Menyediakan perwakilan pekerja dengan fasilitas yang mungkin diperlukan untuk membantu penyusunan perundingan kerja bersama yang efektif



Memungkinkan perwakilan pekerja yang berwenang dalam pekerjaan mereka di setiap negara di mana mereka beroperasi untuk melakukan negosiasi dengan perwakilan dari manajemen yang berwenang untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang sedang diperundingkan



Tidak mengancam untuk memindahkan seluruh atau sebagian dari unit operasi dari negara yang bersangkutan guna mempengaruhi perundingan secara tidak adil atau menghalangi pelaksanaan hak untuk berorganisasi



Menyediakan informasi yang diperlukan bagi perwakilan pekerja untuk perundingan yang bermakna.

Perusahaan multinasional dan nasional diundang untuk



Menanggapi secara konstruktif permintaan pemerintah akan informasi yang relevan tentang operasi mereka.

Pemerintah dihibau untuk



Menyediakan kepada perwakilan organisasi pekerja berdasarkan permintaan, apabila hukum dan praktik mengizinkan, informasi tentang industri di mana perusahaan multinasional beroperasi, yang akan membantu dalam peletakan kriteria obyektif dalam proses perundingan bersama.

Konsultasi, pemeriksaan keluhan dan penyelesaian sengketa

Perusahaan multinasional dan nasional diundang untuk



Memiliki sistem yang dirancang berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja serta perwakilan mereka untuk konsultasi rutin tentang hal-hal yang menjadi perhatian bersama



Menghormati hak pekerja agar semua keluhan mereka diproses tanpa prasangka dan



Berusaha untuk membangun, bersama dengan perwakilan dan organisasi pekerja, mekanisme konsiliasi sukarela untuk membantu pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial antara pengusaha dan pekerja.

Pusat Bantuan ILO (ILO Helpdesk)
Program Perusahaan Multinasional
 Kantor Perburuhan Internasional
 4, route des Morillons
 1211 Geneva 22, Switzerland
 Tel. +41.22.799.6264
 Fax. +41.22.799.6354
assistance@ilo.org

Kantor ILO Jakarta
 Menara Thamrin Lantai 22
 Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
 Telp. +62 21 391 3112
 Faks +62 21 3983 8959
www.ilo.org/jakarta